

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi di lapangan, dan data dari dokumen yang telah dianalisis pada penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam Pengelolaan Drainase sebagai Strategi Pencegahan Banjir belum cukup berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yang disimpulkan sebagai berikut:

4.1.1 Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam Pengelolaan Drainase

1. Produktivitas kinerja Dinas PUPR dalam pengelolaan sistem drainase telah ditunjukkan melalui berbagai upaya seperti pembangunan saluran baru, rehabilitasi saluran lama, dan perawatan rutin, serta pemanfaatan anggaran swakelola untuk penanganan cepat terhadap masalah drainase yang mendesak. Produktivitas Dinas PUPR Kabupaten Kudus dapat dikatakan belum berjalan secara optimal dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga pembangunan dan rehabilitasi drainase belum tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Kudus. Pada capaian target kualitas drainase juga menunjukkan adanya penurunan persentase drainase dalam kondisi baik pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya dan masih banyak drainase yang belum terbangun di beberapa wilayah.
2. Indikator kualitas pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam pengelolaan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat karena masih terdapat kendala terkait kualitas hasil pekerjaan seperti kondisi jalan ambles

dan pemasangan *paving block* yang kurang rapi sehingga penyelesaian permasalahan belum sepenuhnya optimal. Hambatan lain yang ditemukan dalam pengelolaan drainase yaitu berkaitan dengan pemeliharaan rutin pada saluran drainase karena masih banyak ditemukan sampah yang menjadi penyebab tersumbatnya drainase.

3. Dinas PUPR Kabupaten Kudus menunjukkan responsivitas yang baik dalam menangani masalah drainase yaitu dengan penanganan yang cepat pada keluhan mendesak dan mengedepankan sistem penanganan prioritas. Kecepatan tanggap Dinas PUPR terlihat dari kemampuan mereka merespon keluhan masyarakat dengan cepat, di mana penanganan masalah sederhana dapat dilakukan dalam hitungan jam hingga hari. Dinas PUPR Kabupaten Kudus juga telah menyediakan berbagai saluran komunikasi, seperti website, media sosial, dan aplikasi pengaduan resmi. Dalam hal pelibatan masyarakat, Dinas PUPR secara aktif mengadakan *Pre-Construction Meeting (PCM)* sebelum pelaksanaan proyek drainase untuk menginformasikan, mengakomodasi aspirasi, dan mengantisipasi dampak sosial dari pembangunan.
4. Dinas PUPR Kabupaten Kudus telah menunjukkan tingkat responsibilitas yang baik dalam pelaksanaan pembangunan dan perbaikan drainase dengan menjalankan setiap proses sesuai prinsip administrasi dan kebijakan organisasi. Setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan, hingga pengawasan dilakukan berdasarkan regulasi resmi seperti SOP, KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan Spesifikasi Teknis. Dinas PUPR juga

telah menerapkan prosedur mediasi bertahap serta mekanisme surat menyurat sebelum tindakan pembongkaran dilakukan. Selain itu, dinas juga melibatkan berbagai pihak melalui PCM dan pengecekan teknis di lapangan (*uitzet*) untuk memastikan kesesuaian rencana dengan kondisi di lapangan.

5. Akuntabilitas di Dinas PUPR Kabupaten Kudus sudah cukup berjalan baik, terutama dalam hal pelaporan kinerja yang dibuktikan dengan adanya dokumen LKjIP. Namun, masih terdapat kekurangan dalam aspek keterbukaan informasi kepada publik yaitu karena belum diperbaruinya informasi di media sosial dan *website*, khususnya oleh Bidang Tata Bangunan dan Drainase. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum diterapkan secara merata di semua bidang.

4.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam Pengelolaan Drainase

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam pengelolaan drainase adalah sebagai berikut:

1. Faktor sistem berkaitan dengan keterbatasan anggaran dan fasilitas kerja. Alokasi dana yang minim menyebabkan masalah drainase belum dapat tertangani secara maksimal. Selain itu, keterbatasan peralatan seperti kendaraan operasional dan material bangunan berdampak pada lambatnya penanganan drainase di lapangan.
2. Faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam membuang sampah. Banyak

warga masih membuang sampah sembarangan ke saluran air sehingga menyebabkan drainase tersumbat dan menghambat kinerja dinas dalam mencegah dan menangani banjir serta genangan.

Sedangkan faktor pendorong kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam pengelolaan drainase adalah sebagai berikut:

1. Faktor personal, ditunjukkan dengan adanya komitmen yang tinggi serta semangat kerja yang kuat meskipun banyak pegawai tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sepenuhnya sesuai dengan bidang drainase.
2. Faktor kepemimpinan juga memainkan peran penting yang ditunjukkan oleh sikap kepala bidang secara aktif memberikan arahan, motivasi, dan dukungan, khususnya saat menghadapi kondisi darurat seperti banjir atau genangan.
3. Faktor tim yang kuat terlihat dari koordinasi yang baik antar pegawai dibuktikan dengan adanya sikap saling pengertian, serta kesediaan untuk saling mengingatkan dan membantu jika terdapat kendala. Evaluasi dan pengawasan kinerja juga telah dilakukan secara rutin, baik melalui rapat maupun tindakan langsung untuk memastikan bahwa berjalan sesuai dengan target.

4.2 Saran

Setelah melalui serangkaian penelitian dan analisis mendalam, berikut saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam Pengelolaan Drainase.

4.2.1 Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam Pengelolaan Drainase

1. Untuk meningkatkan produktivitas Dinas PUPR Kabupaten Kudus diperlukan sistem monitoring terhadap kondisi drainase secara berkala. Hal ini dilakukan agar dapat membantu mendeteksi kerusakan lebih awal sehingga perbaikan dapat dilakukan tepat waktu sebelum permasalahan drainase semakin besar sehingga dapat menekan penggunaan anggaran. Langkah lain yang dapat dilakukan yaitu dengan penguatan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung pemeliharaan drainase secara berkelanjutan.
2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan drainase, Dinas PUPR Kabupaten perlu memperketat pengawasan pada kualitas pekerjaan selama proses pembangunan misalnya pada teknis pelaksanaan pemasangan *paving block* dan pengerasan jalan. Perlu dilakukan evaluasi yang lebih ketat dalam pemilihan pihak ketiga atau kontraktor yang akan mengerjakan proyek drainase.
3. Dinas PUPR Kabupaten Kudus perlu meningkatkan keterbukaan informasi dengan rutin memperbarui konten di media sosial dan website, terutama dari Bidang Tata Bangunan dan Drainase. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan jadwal rutin dan penanggung jawab khusus agar informasi selalu terupdate dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
4. Pengelolaan drainase di Kabupaten Kudus memerlukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor antara Dinas PUPR, DLHK, Dinas Perumahan dan Permukiman, pemerintah desa, serta masyarakat. Sinergi ini penting untuk

memastikan saluran tetap bersih, berfungsi optimal, dan mampu mengurangi risiko genangan secara berkelanjutan.

4.2.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam Pengelolaan Drainase

1. Dinas PUPR perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada dengan melakukan pengawasan yang ketat selama proyek berjalan. Selain itu, perlu juga dilakukan perawatan rutin terhadap peralatan dan fasilitas yang agar tetap dalam kondisi baik sehingga penanganan drainase bisa berjalan lancar walaupun fasilitas yang tersedia terbatas. Dinas PUPR juga perlu menerapkan sistem pemantauan secara berkala untuk mendeteksi masalah drainase sejak dini agar kerusakan bisa segera diperbaiki sebelum bertambah parah sehingga biaya perbaikan dapat diminimalkan.
2. Dinas PUPR perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi drainase dan memberikan sosialisasi terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terutama dalam hal membuang sampah pada tempatnya. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah desa, sekolah, maupun tokoh masyarakat serta memanfaatkan media sosial melalui kampanye (*campaign*) agar kesadaran masyarakat meningkat dan mengurangi kebiasaan membuang sampah pada saluran drainase.